

VOL. 29 MEI 2022



DEWANPERS

ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS

DUA KASUS MENARIK
DI BULAN MEI

PENYUSUNAN
SKKNI

VERIFIKASI FAKTUAL
BULAN MEI

NAKHODA BARU DEWAN PERS



COVER DIOLAH DARI FOTO: DEWAN PERS

MENJADI MITRA KRITIS PEMERINTAH

Oleh: **ARIF SUPRIYONO**
Redaktur Pelaksana



Tingkat estafet kepengurusan Dewan Pers telah berpindah tangan. Melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 14/M Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pers, Presiden Joko Widodo memberhentikan keanggotaan Dewan Pers periode 2019-2022 dan mengangkat pengurus baru Dewan Pers masa bakti 2022-2025.

Kali ini, nakhoda Dewan Pers akan dikemudikan oleh Prof Azyumardi Azra selaku ketua. Sedangkan delapan anggota Dewan Pers lain adalah M Agung Dharmajaya (wakil ketua), Paulus Tri Agung Kristanto, Arif Zulkifli, Ninik Rahayu, Yadi Hendriana, Asmono Wikan, Atmaji Sapto Anggoro, dan Totok Suryanto. Serah terima jabatan dari Prof Mohammad Nuh (ketua Dewan Pers periode sebelumnya) kepada Azyumardi Azra dilakukan pada 18 Mei 2022 di Jakarta.



▲ KETUA DEWAN PERS PERIODE 2019-2022, MOHAMMAD NUH (KANAN) BERSAMA KETUA DEWAN PERS TERPILIH 2022-2025 AZYUMARDI AZRA (KIRI). PENYERAHAN SALINAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/M TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN DEWAN PERS” DALAM ACARA SERAH TERIMA JABATAN ANGGOTA DEWAN PERS DI JAKARTA PADA RABU (18/5/2022)
 ➤ FOTO INSET: AZYUMARDI AZRA DAN MOHAMMAD NUH SAAT MENANDATANGANI BERITA ACARA. (FOTO: DEWAN PERS)



Dalam serah terima jabatan itu Prof Azra mengutarakan, tantangan Dewan Pers ke depan bukan hal yang ringan tetapi justru akan semakin berat. Namun dia yakin, dengan fondasi dan kontribusi yang sudah diberikan oleh kepengurusan masa bakti sebelum-sebelumnya, Dewan Pers akan bisa menjalankan amanah untuk memajukan dunia pers dan kawan-kawan yang bergerak di bidang pers.

“Era sekarang ini penuh disrupsi atau kekacauan, termasuk di dalamnya soal informasi. Juga ada kecenderungan merosotnya nilai keadaban dalam dunia media. Mereka ada yang terbiasa menghujat. Ini salah satu tantangan kita. Tentu saja dengan bantuan para konstituen Dewan Pers dan mereka yang mencintai dunia pers, kami merasa lebih yakin menjalankan amanah untuk memajukan dunia pers kita,” tutur Prof Azra.

Lantaran makin beratnya tantangan ke depan, dia menginginkan adanya kesatuan derap dan lang-

kah di internal Dewan Pers untuk bergerak menuju arah yang sama ke depan. Tantangan besar dalam kehidupan pers, ujarnya, membutuhkan perhatian besar semua pihak. Untuk itu, Prof Azra mengatakan soliditas anggota Dewan Pers sangat diharapkan.

MITRA KRITIS

Di pelbagai kesempatan pun, Prof Azra mengungkapkan hubungan Dewan Pers dengan pemerintah. “Dewan Pers itu mitra pemerintah. Kami ingin Dewan Pers menjadi mitra kritis bagi pemerintah,” kata mantan rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah itu.

Menurut Prof Azra, pers perlu mendukung kebijakan positif dari pemerintah. Akan tetapi jika dirasakan ada kebijakan yang tidak tepat dari pemerintah, adalah tugas pers untuk mengingatkan dan memberi masukan. Dewan Pers, dia



ANGGOTA DEWAN PERS PERIODE 2019-2022 DAN ANGGOTA DEWAN PERS TERPILIH PERIODE 2022-2025 BERFOTO BERSAMA USAI ACARA SERAH TERIMA JABATAN ANGGOTA DEWAN PERS DI JAKARTA PADA RABU (18/5/2022). (FOTO: DEWAN PERS)

melanjutkan, tidak akan mungkin sendirian untuk memberikan kritik atau masukan terhadap persoalan bangsa yang sedemikian banyak dan luas. Hal ini perlu kerja sama dengan banyak pihak agar perbaikan kondisi bangsa lebih bisa terlaksana.

Keberadaan pers abal-abal juga tak lepas dari perhatian Prof Azra. Dia mengaku prihatin atas banyaknya media abal-abal. “Medianya abal - abal, penulisannya abal-abal. Terkadang isinya juga abal- abal. Ini yang membuat repot banyak pihak,” kilahnya. Dia menekankan pentingnya jurnalisme berkualitas. Dengan begitu, maka berita yang disajikan akan kredibel atau berkualitas dan akuntabel alias dapat dipertanggungjawabkan.

Tentang merosotnya keadaban dalam dunia media ini juga menjadi sorotan Mohammad Nuh. Dia menjelaskan, upaya mencerdaskan kehidupan

bangsa akan sulit tercapai jika diskursus yang terjadi malah saling hina dan sinis. Ia mengaku rindu atas diskursus dengan intelektualitas yang kuat, saling memberi latar belakang akademik, disertai kajian-kajian yang mencerahkan. Cara seperti itu, kata Nuh, akan punya kontribusi besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Nuh juga mengingatkan salah satu tugas besar ke depan bagi Dewan Pers dan insan media adalah berperan dalam migrasi pers dari *physical space* (ruang fisik) ke *cyber space* (ruang siber). “Ini perlu kontribusi Dewan Pers di era daring, digital, dan media sosial saat ini. Perlu menciptakan kondisi supaya ruang siber itu bukan menjadi arena yang menakutkan atau sangar akan tetapi justru menjadi lahan subur bagi upaya memperkuat kebangsaan dan kenegaraan kita,” papar mantan mendikbud itu.

Sudah selayaknya, kata Nuh yang juga mantan rektor Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya, Dewan Pers ikut memperhatikan sisi ruang siber tersebut. Dengan demikian, Dewan Pers tidak hanya mengurus wilayah cetak, daring, dan elektronik saja namun juga terlibat dalam wilayah siber dalam arti luas bersama komponen lain yang berkepentingan.

Dalam pandangan Nuh, tidak boleh ada wilayah media yang tidak ada penanggung jawabnya. Dengan cara ini, Dewan Pers akan bisa membawa pers atau media apa pun bentuknya ke arah yang lebih berkualitas. Ia menyebut dua hal penting dari keberadaan media, yakni kualitas dan kemerdekaan pers.

“Syahadatnya dunia pers itu kan kemerdekaan pers. Ibaratnya ke mana pun arah yang dituju, pers tetap menginginkan kemerdekaan. Namun kemerdekaan pers itu bukan untuk kemerdekaan itu sendiri tetapi untuk kehidupan yang berkualitas. Kualitas jurnalis kita harus kian meningkat, termasuk menyiapkan jurnalis yang spesialis. Ini agar data yang disajikan pers kita tidak sekadar berupa informasi tetapi sekaligus juga bisa menjadi pengetahuan,” kata Nuh.

Harapan peningkatan kualitas pers nasional juga diutarakan oleh Prof Bagir Manan. Ketua Dewan Pers periode 2010-2016 ini menjelaskan, bahwa setiap kebijakan yang diterapkan senantiasa mengutamakan unsur profesionalitas. Di mata Bagir, ikatan profesionalitas pers ini sangat menonjol.

Namun, ujarinya, kuatnya ikatan itu bukan berarti tidak boleh ada perbedaan di antara mereka. “Perbedaan itu hal yang alamiah. Nilai ini bisa kita sebarkan, bahwa mengelola organisasi itu perlu dilakukan secara profesional dengan unsur-unsur saling pengertian, kesabaran, dan toleransi,” ujarinya.

Dia yakin kualitas pers akan ikut mendorong proses demokratisasi. Mantan ketua Mahkamah Agung itu menguraikan, demokrasi di Amerika Serikat relatif stabil. Itu terjadi karena tingkat kesejahteraan masyarakatnya sangat tinggi dan



Era sekarang ini penuh disrupsi atau kekacauan, termasuk di dalamnya soal informasi. Juga ada kecenderungan merosotnya nilai keadaban dalam dunia media. Mereka ada yang terbiasa menghujat. Ini salah satu tantangan kita. Tentu saja dengan bantuan para konstituen Dewan Pers dan mereka yang mencintai dunia pers, kami merasa lebih yakin menjalankan amanah untuk memajukan dunia pers kita,” tutur Prof Azra.

kuatnya kelas menengah di sana. Di samping itu, dia menambahkan dua hal lagi yang diperlukan untuk menjaga demokrasi agar stabil dalam jangka waktu lama, yaitu intelektualitas dan etika publik.

Di situlah Dewan Pers bisa mengambil peran. Ia menyarankan Dewan Pers lebih banyak lagi melakukan pelatihan dan pendidikan bagi anggotanya secara berkesinambungan.

Pendapat itu memperoleh dukungan dari Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari. Kharis menilai, pers merupakan salah satu penopang demokrasi di Indonesia. Ia mendambakan kehidupan pers yang semakin sehat dan tidak ada unsur saling mencela satu sama lain.

Ia pun sepakat perlunya iklim kebebasan pers terus dijaga. “Akan tetapi itu bukan dalam arti kebebasan sebeb-bebasnya. Juga bukan bebas yang hanya slogan saja tetapi harus nyata,” kata Kharis.●

PROFIL ANGGOTA DEWAN PERS 2022-2025



ANGGOTA DEWAN PERS TERPILIH PERIODE 2022-2025 BERFOTO BERSAMA DALAM ACARA SERAH TERIMA JABATAN ANGGOTA DEWAN PERS PADA RABU (18/5/2022) DI JAKARTA. (FOTO: DEWAN PERS)

AZYUMARDI AZRA (KETUA DEWAN PERS)

AZYUMARDI Azra, yang lebih akrab dipanggil Prof Azra, terpilih sebagai anggota Dewan Pers 2022 – 2025 dari unsur tokoh masyarakat. Ia kemudian didapuk menjadi ketua Dewan Pers pada periode ini. Karier pendidikan tingginya ia awali di Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jakarta pada tahun 1982. Setelah memperoleh beasiswa Full-bright, Prof Azra meraih gelar Master of Art (MA) pada Departemen



Bahasa dan Budaya Timur Tengah, Columbia University, pada 1988. Ia juga mendapatkan beasiswa Columbia President Fellowship dari kampus yang sama, tetapi kali ini Azyumardi pindah ke bidang sejarah, dan meraih gelar MA keduanya pada 1989.

Pada 1992, ia menambah gelar master of philosophy (MPhil) dari Departemen Sejarah, Columbia University tahun 1990, dan doctor of philosophy degree dengan disertasi berjudul "The Transmission of Islamic Reformism to Indonesia: Network of Mid-

dle Eastern and Malay-Indonesian ‘Ulama in the Seventeenth and Eighteenth Centuries.’

Kembali ke Jakarta, pada tahun 1993 Azyumardi mendirikan sekaligus menjadi pemimpin redaksi Studia Islamika, sebuah jurnal Indonesia untuk studi Islam. Sebelumnya, ia pernah menjadi wartawan Panji Masyarakat (1979-1985). Pada tahun 1994-1995, Prof Azra mengunjungi Southeast Asian Studies pada Oxford Centre for Islamic Studies, Oxford University, Inggris, sambil mengajar sebagai dosen pada St. Anthony College. Pakar demokrasi dan Islam ini juga pernah menjadi profesor tamu pada Universitas Filipina dan Universitas Malaya, Malaysia, pada tahun 1997. Prof Azra juga merupakan anggota Selection Committee of Southeast Asian Regional Exchange Program (SEASREP) yang diorganisir oleh Toyota Foundation dan Japan Center, Tokyo, Jepang antara tahun 1997 dan 1999.

Sejak Desember 2006, ia menjabat direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Sebelumnya, sejak tahun 1998 hingga akhir 2006, ia menjabat rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dosen Fakultas Adab dan Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1992-sekarang), guru besar sejarah Fakultas Adab IAIN Jakarta, dan pembantu rektor I IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1998). Prof Azra merupakan orang Asia Tenggara pertama yang diangkat sebagai Professor Fellow di Universitas Melbourne, Australia (2004 - 2009) dan anggota Dewan Penyantun (Board of Trustees) International Islamic University Islamabad Pakistan (2004 - 2009). Ia juga masih menjadi salah satu anggota Teman Serikat Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pe-

merintahan. Ia pernah lama menjadi penulis tetap di Harian Republika. ●

M. AGUNG DHARMAJAYA
WAKIL KETUA DEWAN PERS



SEBELUM menjabat wakil ketua Dewan Pers periode 2022–2025, M Agung Dharmajaya, yang terpilih sebagai anggota Dewan Pers dari unsur pimpinan perusahaan pers, adalah anggota Dewan Pers sekaligus ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers periode 2019-2022. Ia tengah menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas Jenderal Soedirman program studi ilmu manajemen.

Agung memulai karier tahun 1996 pada manajemen perusahaan telekomunikasi, perusahaan penerbitan majalah, dan industri penyiaran televisi dan radio. Dikenal sebagai praktisi manajemen terkait regulasi, membuat Agung dipercaya menjabat sebagai direksi dan konsultan di media penyiaran TV lokal dan radio sampai saat ini. Agung mewakili Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) sebagai anggota tim perumus revisi Undang-Undang Penyiaran 2002 dan menyampaikan hasil kajian ATVLI kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2014-2019, tetapi belum dapat disepakati. Upaya Agung

melalui ATVLI ini mengantarkannya menjadi anggota Dewan Pers periode 2019–2022 mewakili unsur pimpinan perusahaan pers.

Ia menyelesaikan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 55 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI tahun 2016. Saat ini Agung aktif sebagai pengurus Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas 55 dan hal ini membuka ruang bagi Dewan Pers dalam memperkuat komunikasi bersama perwakilan pemerintah, masyarakat, dan media. ●

YADI HENDRIANA
**ANGGOTA DEWAN PERS/
KETUA KOMISI PENGADUAN DAN
PENEGAKAN ETIKA PERS**



YADI Hendriana, yang mewakili unsur wartawan, terpilih menjadi anggota Dewan Pers merangkap ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers pada periode 2022-2025. Pria kelahiran Ciamis tahun 1975 ini menjabat sebagai Direktur Pemberitaan MNC Portal Indonesia. Yadi berkarier di MNC Group sejak 2004 dan pernah menjabat beberapa posisi eksekutif, antara lain News Producer Global TV (2004–2005), executive producer news Global TV (2005–2006), news gathering & production head Global TV (2006

– 2007), wakil pemimpin redaksi Global TV (2007 – 2013), pemimpin redaksi MNCTV (2013 – 2017), dan deputy news director dan pemimpin redaksi iNews (2017–2020). Ia berturut-turut menjadi ketua umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) periode 2012-2016 dan 2017-2021. Yadi meraih gelar sarjana ilmu sosial pada 1998 dan program S2 ilmu politik pada 2019 di Universitas Diponegoro, Semarang. Saat ini Yadi sedang menyelesaikan pendidikan S3 ilmu komunikasi di Universitas Padjajaran, Bandung.●

ARIF ZULKIFLI
ANGGOTA DEWAN PERS/
KETUA KOMISI HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN



ANGGOTA Dewan Pers Arif Zulkifli, yang mewakili unsur wartawan, menjabat sebagai ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan pada periode 2022-2025. Pada periode sebelumnya, 2019–2022, jurnalis yang akrab disapa Azul ini adalah ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers. Peraih penghargaan O’Neil Journalism Award dari Pemerintah Australia pada tahun

2010 ini mengawali kariernya sebagai reporter di Pusat Data dan Analisa Tempo pada tahun 1994. Setelah itu, karier Arif terus meroket menjadi Pemimpin Redaksi Majalah Tempo hingga kini menjabat sebagai Pemimpin Perusahaan Tempo.●

TOTOK SURYANTO
ANGGOTA DEWAN PERS/
KETUA KOMISI HUBUNGAN ANTAR
LEMBAGA DAN LUAR NEGERI



TOTOK Suryanto terpilih menjadi anggota Dewan Pers periode 2022-2025 merangkap ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri mewakili unsur pimpinan perusahaan pers. Pria kelahiran Blitar, Jawa Timur, pada 1967 merupakan lulusan magister manajemen dari Universitas Terbuka Indonesia dan mendapat gelar sarjana administrasi negara dari Universitas Brawijaya, Malang. Totok aktif sebagai pengurus dan anggota Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), pengurus Kwarnas Pramuka dan pengurus Koperasi Mahasiswa saat masih berkuliah. Wakil pemimpin redaksi TV One ini pernah meniti karier jurnalistik sebagai senior manager Liputan 6 SCTV, jurnalis Majalah Berita Sinar Jakarta, reporter Surabaya Post, penyiar Radio Puspita FM Malang, dan redaktur

Koran Universitas Brawijaya. Totok pernah mengikuti kursus singkat di London dan Arab Saudi. Jaringan dan akses ke pimpinan TNI-Polri, kawasan Timur Tengah, serta jurnalis dan media dunia Islam merupakan keunggulannya.●

NINIK RAHAYU
ANGGOTA DEWAN PERS/ KETUA
KOMISI PENELITIAN, PENDATAAN,
DAN RATIFIKASI PERS



NINIK Rahayu terpilih menjadi anggota Dewan Pers periode 2022-2025 dari unsur masyarakat ini menjabat sebagai ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers. Ia aktif sebagai pengajar fakultas hukum di perguruan tinggi dan diklat pendidikan hukum kantor dan lembaga sejak 1987-sekarang. Ninik pernah pula menjadi komisioner Komnas Perempuan pada periode 2006-2009 dan 2010-2014 dan anggota Ombudsman RI pada periode 2016-2021. Ia juga menjadi tenaga profesional Lemhannas RI sejak 2020 dan sebagai direktur JalaStoria sebuah perkumpulan yang memiliki visi mewujudkan masyarakat Indonesia yang inklusif dan aktif dalam upaya penghapusan diskriminasi. Ia juga penulis buku politik, hukum, dan penghapusan kekerasan seksual di Indonesia.●

PAULUS TRI AGUNG KRISTANTO

**ANGGOTA DEWAN PERS/
KETUA KOMISI PENDIDIKAN DAN
PENGEMBANGAN PROFESI PERS**



PAULUS Tri Agung Kristanto, yang mewakili unsur wartawan, terpilih menjadi anggota Dewan Pers periode 2022-2025 sekaligus ketua Komisi Pendidikan dan Pengembangan Profesi Pers. Lahir di Yogyakarta pada tahun 1968, jurnalis yang akrab dipanggil TRA ini mengenyam pendidikan di MMDP Prasetya Mulya Business School-Kompas Gramedia dan lulus sarjana ilmu politik dari Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. TRA aktif sebagai Dewan Kehormatan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), penasihat Forum Bahasa Media Massa (FBMM), dan Komisi Komunikasi Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia (YLAI). Ia terlibat sebagai editor dan penulis buku-buku, antara lain “Jangan Bunuh KPK”, “Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum”, “Demokrasi Konstitusional.”. Wakil pemimpin redaksi Harian Kompas ini pernah menjadi anggota tim penyusun RUU Tindak Pidana Terorisme dan RUU Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia kerap kali menjadi juri berbagai lomba penulisan. TRA merupakan pemegang Press Card Number One, dan

penerima penghargaan Mohammad Yamin untuk Jurnalis Konstitusi.●

ASMONO WIKAN
**ANGGOTA DEWAN PERS/
KETUA KOMISI PEMBERDAYAAN
DAN ORGANISASI**



ASMONO Wikan terpilih sebagai anggota Dewan Pers 2022-2025 mewakili unsur pimpinan perusahaan pers. Karier pria yang menggemari *travelling* dan mendengarkan musik ini diawali pada 1997 dengan bekerja di perusahaan periklanan Matari Advertising di divisi penerbitan media bernama majalah CAKRAM setelah lulus sarjana ilmu komunikasi FISIP Universitas Diponegoro, 1997. Pada Oktober 2005, Asmono bergabung menjadi direktur eksekutif Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat, hingga akhirnya pada Februari 2019 ia didapuk menjadi sekretaris jenderal (sekjen) sampai sekarang. Perjalanan kariernya banyak bersinggungan dengan ekosistem periklanan dan *public relations* (PR), di samping tentu saja lingkungan pers. Sejak 2015 hingga saat ini, Asmono juga mengelola media komunitas kehumasan, PR INDONESIA. Selama pandemi, ia aktif bermain *podcast* dan menerbitkan buku melalui payung MAW Talk, antara lain “Bergerak: Mengakrabi Disrupsi, Menciptakan Peluang” (Juli

2020), “Public Relations 6.0: Hati, Reputasi, Pandemi” (Maret 2021), dan “Energi Kebaikan & Komunikasi Empatik” (Agustus 2021). Kini, Asmono tengah menyelesaikan studi S2 di MIKOM, Fisip, UPN Veteran Yogyakarta.●

ATMAJI SAPTO ANGGORO
**ANGGOTA DEWAN PERS/
KETUA KOMISI KEMITRAAN DAN
INFRASTRUKTUR ORGANISASI**



ATMAJI Sapto Anggoro adalah anggota Dewan Pers sekaligus ketua Komisi Kemitraan dan Infrastruktur Organisasi Dewan Pers periode 2022-2025. Ia mewakili unsur tokoh masyarakat. Sapto merupakan anggota sekaligus pendiri Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) dan sekretaris jenderal Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJI) periode 2012-2015. Sapto ikut membangun portal berita detikcom, pendiri media monitoring Binokular, portal berita Tirto.id, dan Padepokan ASA yang bergerak di bidang sosial, pendidikan serta kebudayaan. Awal kariernya di dunia pers dimulai di Surabaya Post, Berita Buana, dan Harian Republika. Sepanjang kariernya, pria asal Jombang, Jawa Timur, ini telah menerbitkan dua buah buku, “Legenda Media Online (detikcom)”; dan “Mantra Justru.”● *Imam Suwandi*

RANGKUMAN KEGIATAN UKW BULAN MEI **SEIMBANGKAN JURNALISME BERKUALITAS DAN BISNIS PERS YANG BERKELANJUTAN**

Anggota Dewan Pers sekaligus ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi (KPO), Asmono Wikan, membuka sekaligus memberi sambutan mengawali kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bagi para jurnalis se-Sumatera Selatan pada Senin (30/5) di Palembang. Kegiatan UKW tersebut difasilitasi oleh Dewan Pers bekerja sama dengan lembaga uji Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama) diikuti oleh 54 jurnalis yang berlangsung selama dua hari, 30-31 Mei 2022.

Dalam paparannya, Asmono menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan antara jurnalisisme berkualitas dengan media berkelanjutan. “Pers yang mandiri dan independen adalah yang mampu menyeimbangkan produk jurnalisisme yang berkualitas dengan bisnis pers yang berkelanjutan,” ujar Asmono.

Pelaksanaan UKW ke daerah-daerah terus digelar. Pada awal Mei, anggota Dewan Pers periode 2019-2022 yang juga ketua Komisi Penelitian, Pendaan, dan Ratifikasi Pers, Ahmad Djauhar, membuka sekaligus memberi sambutan dalam acara UKW yang digelar pada Kamis-Jumat (12-13/5) di Bandung, Jawa Barat. Acara tersebut terselenggara berkat kerja sama Dewan Pers dengan lembaga uji Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) serta dihadiri pula Willy Pramudya (AJI Indonesia), Ahmad Alhafiz (IJTI Pusat), dan Faiz Rahman (Dinas Kominfo Provinsi Jabar).

Pada kesempatan berbeda, anggota Dewan Pers periode 2019 - 2022, Jamalul Insan, membuka acara UKW yang digelar pada Jumat-Sabtu (13-14/5) di Banda Aceh. Acara tersebut juga diselenggarakan kerja sama Dewan Pers dengan lembaga uji Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Solopos. Sambutan disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry CH Bangun, diikuti peserta uji dari wartawan di wilayah Provinsi Aceh.

Kemudian pada Jumat (20/5) di Jawa Tengah, Wakil Ketua Dewan Pers, M Agung Dharmajaya, juga membuka acara Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Semarang. UKW dilaksanakan selama dua hari. Kali ini Dewan Pers bekerja sama dengan lembaga uji Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), London School of Public Relation (LSPR) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Di lokasi yang berbeda, anggota Dewan Pers yang juga sebagai ketua Komisi Pendidikan dan Pengembangan Profesi Pers, Paulus Tri Agung Kristanto, memberikan sambutan sekaligus membuka acara Uji Kompetensi Wartawan pada Senin (23/5) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Acara yang berlangsung selama dua hari itu difasilitasi oleh Dewan Pers bersama dengan lembaga uji dar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan dari Universitas Prof. Dr Moestopo (Beragama), diikuti 54 peserta.

Wakil Ketua Dewan Pers, M. Agung Dharmajaya, juga membuka acara UKW pada Selasa (24/5) di Kota Denpasar, Bali. UKW ini kerja sama Dewan



A WAKIL KETUA DEWAN PERS, M. AGUNG DHARMAJAYA (BERDIRI) MEMBUKA ACARA UJI KOMPETENSI WARTAWAN DI BALI PADA SELASA (24/5/2022). (FOTO: DEWAN PERS)

Pers dengan lembaga uji dari Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS), Kantor Berita Antara, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Dilanjutkan dengan acara UKW pada Jumat (27/5) di Medan, Sumatra Utara, secara daring yang diselenggarakan bersama lembaga uji Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan ANTV. Dalam acara ini turut memberi sambutan dari Koordinator Bidang Komunikasi Bappenas, Dewi Sri Soetijaningsih. Uji kompetensi yang berlangsung selama dua hari itu diikuti 62 peserta.

Hingga semester pertama 2022 ini, dari target 1.700 jurnalis yang ikut uji kompetensi, sudah terlaksana 850 peserta atau 50%. Sisanya akan diselesaikan di semester berikutnya sehingga kegiatan Dewan Pers untuk program ini sudah *on the right track*.

Dengan semakin meningkatnya kualitas wartawan dan media sebagai platform yang menampilkan produknya, maka diharapkan pengaduan akan semakin menurun. Dewan Pers saat ini juga tidak hanya menunggu pengaduan, tapi proaktif untuk memperingatkan media yang menulis informasi

tetapi mengabaikan etika jurnalistik, terutama berkaitan dengan norma susila dan seksualitas. Tujuannya untuk menciptakan informasi yang lebih sehat di masyarakat. • *Imam Suwandi*

Catatan Pelaksanaan UKW Bulan Mei:

- Uji Kompetensi Wartawan yang digelar pada Kamis- Jumat (12-13/5) di Bandung, Jawa Barat.
- Uji Kompetensi Wartawan yang digelar pada Jumat-Sabtu (13-14/5) di Banda Aceh, Provinsi Aceh.
- Uji Kompetensi Wartawan di Provinsi Jawa Tengah pada Jumat (20/5).
- Uji Kompetensi Wartawan pada Senin (23/5) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
- Uji Kompetensi Wartawan pada Selasa (24/5) di Kota Denpasar, Bali.
- Uji Kompetensi Wartawan pada Jumat (27/5) di Medan, Sumatra Utara secara daring.
- UKW dan UKJ di Palembang bagi para jurnalis se-Sumatra Selatan, Senin (30/5).

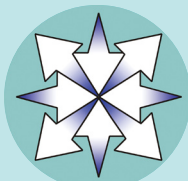
VERIFIKASI FAKTUAL BULAN MEI

Verifikasi faktual perusahaan pers terus dilaksanakan Dewan Pers dalam rangka menjaga kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas jurnalisisme di Indonesia. Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry CH Bangun, melaksanakan verifikasi faktual ke beberapa perusahaan media, di antaranya, habanusantara.net pada Kamis (12/5) di Banda Aceh, Provinsi Aceh. Dalam acara tersebut turut hadir anggota Dewan Pers, Jamalul Insan, bertemu dengan Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab media Sudirman Mansyur yang didampingi tim redaksi.

Di lokasi berbeda pada hari yang sama, anggota Dewan Pers, Jamalul Insan, juga melaksanakan verifikasi faktual perusahaan pers



A ANGGOTA DEWAN PERS PERIODE 2019-2022, AHMAD DJAUHAR (KIRI) MELAKSANAKAN VERIFIKASI SECARA FAKTUAL MEDIA HARIAN SUARA CIREBON PADA KAMIS (12/5/2022). (FOTO: DEWAN PERS)



DEWANPERS

Buletin Etika: Terbit Bulanan, Pengurus Dewan Pers 2022 - 2025. **Susunan Redaksi Buletin Etika:** Dewan Pengarah Buletin Dewan Pers. **Ketua:** Prof. Azyumardi Azra, **Wakil Ketua:** M Agung Dharmajaya, **Anggota:** Yadi Hendriana, Arif Zulkifli, Totok Suryanto, Ninik Rahayu, Paulus Tri Agung Kristanto. **Sekretaris Dewan Pers:** Syaefudin.

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Asmono Wikan, **Wakil Pemimpin Redaksi:** Atmaji Sapto Anggoro, **Redaktur Pelaksana:** Arif Supriyono, **Sekretaris Redaksi:** Firdha Yuni Gustia, **Redaksi:** Abdul Salam Fadli, Reynaldo Adair, Imam Suwandi, Reza Andreas, **Sekretariat:** Deritawati, Maria Susilawati, Sri Lestari, Wawan, Elly Savitri Damayanthi, Watini, Adi Pramudita, **Kuangan:** Irwan, Wisnu, **Desain:** Iwhan Gimbal.

Alamat Redaksi: Gedung Dewan Pers, Jl Kebon Sirih 34, Gedung Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih No.32-34, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110 Telp: Sosial Media: Facebook: Dewan Pers, Twitter: @dewanpers, Instagram: @officialdewanpers, Youtube: Dewan Pers Official, Podcast: podcastdewanpers Website Resmi: www.dewanpers.or.id

(Buletin Etika dalam format PDF dapat diunduh dari website resmi secara gratis.)



A ANGGOTA DEWAN PERS PERIODE 2019-2022, AGUS SUDIBYO (KEEMPAT DARI KANAN) MELAKSANAKAN VERIFIKASI SECARA FAKTUAL MEDIA SIBER JATIM. TRIBUNNEWS.COM PADA SENIN (16/5/2022). (FOTO: DEWAN PERS)



Besarnya perhatian Dewan Pers atas upaya peningkatan kualitas insan pers dan media bisa dilihat dari anggaran yang ada.

siber mediasatunews.com. Dalam acara itu ketua Komisi Pendidikan dan Pengembangan Profesi Pers, Jamal didampingi staf Sekretariat Dewan Pers, Deritawati. Dari media yang diverifikasi hadir Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab, Muhammad Hamzah, bersama tim redaksinya.

Sementara itu, anggota Dewan Pers, Ahmad Djauhar, juga melaksanakan verifikasi faktual perusahaan pers untuk harian Suara Cirebon pada Kamis (12/5) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dalam acara tersebut Djauhar didampingi oleh staf Sekretariat Dewan Pers,

Syariful, serta pimpinan dan tim redaksi media tersebut.

Pada kesempatan lain, Wakil Ketua Dewan Pers, M Agung Dharma-jaya, melaksanakan verifikasi faktual perusahaan pers media siber suarabaru.id di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat (20/5). Dalam acara itu turut mendampingi Agung, yakni staf Sekretariat Dewan Pers, Sri Lestari, dan Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Widiyartono R serta jajaran redaksinya.

Besarnya perhatian Dewan Pers atas upaya peningkatan kualitas insan pers dan media bisa dilihat dari anggaran yang ada. Dari total anggaran sekitar Rp45 miliar, sebanyak 60% untuk alokasi tugas dan fungsi Dewan Pers. Sisanya sebanyak 40% dialokasikan untuk pendidikan wartawan, termasuk UKW dan verifikasi faktual perusahaan media. • Imam Suwandi

Catatan Pelaksanaan Verifikasi Faktual:

- Verifikasi faktual perusahaan media siber habanusantara.net pada Kamis (12/5) di Banda Aceh, Provinsi Aceh.
- Verifikasi faktual perusahaan media siber mediasatunews.com pada Kamis (12/5) di Banda Aceh, Provinsi Aceh.
- Verifikasi faktual perusahaan pers Harian Suara Cirebon pada Kamis (12/5) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
- Verifikasi faktual perusahaan media siber suarabaru.id di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat (20/5).

PERKEMBANGAN KASUS PERMOHONAN UJI MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Sejak sidang pertama permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dilaksanakan pada Oktober 2021, maka pada bulan Juni 2022 kasus permohonan tersebut memasuki tahap akhir. Majelis hakim Mahkamah Konstitusi akan meramu semua keterangan serta merumuskan putusannya segera setelah menerima kesimpulan para pihak yang berhadapan.

Pada 13 Juni 2022 kesaksian terakhir dilaksanakan oleh pihak turut tergugat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam Nomor Kasus 38/PUU-XIX/2021 dengan mengajukan Saksi Dr Gati Gayatri. Di dalam Keterangannya, Dr Gati Gayatri menyatakan bahwa sertifikasi wartawan oleh Dewan Pers tidak dapat dipersamakan dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SK-KNI).

Keterangan ini merupakan jawaban langsung dari saksi atas permohonan penggugat yang mempertanyakan pasal 15 ayat (2) huruf (f) yang digunakan oleh Dewan Pers selama ini dalam menjalankan fungsinya mengelola bidang jurnalistik. Pada permohonannya, pemohon menyebutkan ketidakjela-

san pasal ini dalam peraturan perundang-undangan yang menyebabkan pasal ini bertentangan dengan konstitusi cq Undang-undang Dasar 1945. Apalagi dengan adanya Badan Sertifikasi Profesi Nasional yang merupakan badan yang berhak mengeluarkan sertifikasi profesi di Indonesia.

Dr Gayatri Gati menyatakan, bahwa peraturan, pedoman, standar, prosedur yang dibentuk oleh Dewan Pers merupakan penerjemahan *self-regulation* sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Bahwa semua produk peraturan tersebut selalu dan senantiasa melalui persetujuan dan kesepakatan para konstituennya.

Mengingat semua produk Dewan Pers adalah hasil kesepakatan konstituen, maka para pemangku kepentingan yang bergabung di dalam konstituen, baik itu wartawan, organisasi wartawan, organisasi perusahaan dan seterusnya adalah bentuk kesadaran sosial dan tanggung jawab publik untuk menaati apa yang telah disepakati bersama. Terlebih lagi semua kesepakatan yang disetujui oleh para konstituen adalah mengenai hal sah dan tidak melawan hukum sehingga secara peraturan perundangan berlaku sebagai hukum bagi para pihak.



SIDANG UJI MATERI KASUS NO. 38/PUU-XIX/2021 DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DENGAN AGENDA MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PIHAK TERKAIT DEWAN PERS PADA KAMIS (19/5/2022) SECARA HYBRID. (FOTO: DEWAN PERS)



Ihwal ketidakjelasan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon justru dipatahkan oleh Dr Gayatri Gati yang menunjukkan bahwa kehadiran Dewan Pers membuat pasal tersebut memiliki kejelasan karena Dewan Pers adalah pihak berfungsi memberikan kepastian hukum. Tidak ada penafsiran lain yang lebih baik dari pelaksanaan secara lugas *voluntary system of regulation* yang diamanatkan di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Saksi yang diajukan saat sidang Mahkamah Konstitusi pada 13 Juni 2022 hanya satu orang. Setelah ada sesi tanya-jawab yang diajukan oleh anggota majelis hakim dan juga oleh pemohon, maka majelis hakim Mahkamah Konstitusi selanjutnya meminta para pihak membuat kesimpulan yang wajib diserahkan dalam jangka waktu seminggu sejak 13 Juni 2022.

Dunia pers, baik insan penggiatnya mau pun perusahaan media, sudah tentu berharap Mahkamah Konstitusi memperhitungkan semua keterangan,

baik keterangan pemerintah, keterangan pihak tergugat berikut semua saksi dan ahli dari pihak tergugat. Semua keterangan tersebut jelas-jelas merupakan keterangan yang bernas akan konsep dan praktik kemerdekaan pers selama puluhan tahun yang telah teruji kebenaran dan manfaatnya bagi pers.

Gugatan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ini diajukan oleh Hientje Gronston Mandagie, Hans M Kawengian, dan Soegiharti Santoso pada 12 Oktober 2021. Mereka menggugat pasal 15 ayat 2 huruf F (tentang peran Dewan Pers memfasilitasi organisasi pers dalam penyusunan peraturan di bidang pers dan peningkatan kualitas profesi pers) dan pasal 15 ayat 5 (keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini ditetapkan dengan keputusan presiden).●

JUNI SOEHARDJO, Kontributor Etika, Tenaga Ahli Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Periode 2019 - 2022

PENYUSUNAN SKKNI

Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019-2022, Hendry Ch Bangun, membuka acara Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang pers atau kewartawanan pada Rabu (11/5) di Kota Tangerang Selatan, Banten. Acara tersebut dipandu moderator dari tenaga ahli Dewan Pers, Marah Siregar, menghadirkan narasumber Direktur Multimedia Kementerian Kominfo, Prof Dr Gati Gayatri, MA yang juga sebagai peneliti ahli utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Dari konstituen Dewan Pers hadir Pewarta Foto Indonesia (PFI) Pusat diwakili oleh Melly Riana Sari; Ketua PFI Tangerang, Faisal R Syam; dan Kelik Widiartono, sekretaris PFI Bogor. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Aliansi Jurnalis

” *Modul uji kompetensi dan penyusunan draf SKKNI ini berisi materi-materi seputar foto jurnalistik, kebebasan dan kemerdekaan pers, UU Pers, ragam pedoman pemberitaan Dewan Pers, liputan investigasi, keselamatan dan mitigasi, hingga manajemen redaksi di media massa.*



▲ RAPAT KEDUA PENYUSUNAN STANDART KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI) BIDANG PERS ATAU KEWARTAWANAN PADA RABU (17/5/2022) DI TANGERANG SELATAN, BANTEN. (FOTO: DEWAN PERS)



RAPAT PENYUSUNAN STANDART KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI) BIDANG PERS ATAU KEWARTAWANAN PADA RABU (11/5/2022) DI TANGERANG SELATAN, BANTEN. (FOTO: DEWAN PERS)

Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS). Anggota Dewan Pers lain yang hadir, yaitu Jamalul Insan, Asep Setiawan, Hassanein Rais. Ikut hadir juga Sekretaris Dewan Pers, Syaefudin, dan beberapa tenaga ahli Dewan Pers serta staf Sekretariat Dewan Pers.

Penyusunan SKKNI bidang pers juga digelar kedua kalinya pada Selasa (17/5) di Kota Tangerang, Banten, yang dibuka oleh Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019-2022, Hendry Ch Bangun. Dalam acara tersebut dihadiri narasumber Prof Dr Gati Gayatri dan Dahlan Dahi, anggota Dewan Pers, Jamalul Insan, Asep Setiawan, dan Hassanein Rais. Anggota Dewan Pers periode 2022-2025 yang hadir, yaitu Atmaji Sapto Anggoro, Paulus Tri Agung Kristanto, Ninik Rahayu. Ada juga dari lembaga Uji Kompetensi Wartawan, konstituen Dewan Pers, Pokja Komisi Pendidikan, serta Sekretariat Dewan Pers.

Sebelumnya Dewan Pers pada 11 Mei 2022 lalu telah menyusun draf tingkatan jenjang/level dan ma-

teri tiap level dari masing-masing jenis media. Ini diperlukan untuk penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Modul uji kompetensi dan penyusunan draf SKKNI ini berisi materi-materi seputar foto jurnalistik, kebebasan dan kemerdekaan pers, UU Pers, ragam pedoman pemberitaan Dewan Pers, liputan investigasi, keselamatan dan mitigasi, hingga manajemen redaksi di media massa. Dalam pertemuan tersebut diharapkan agar ke depannya seluruh wartawan di Indonesia memiliki kompetensi yang terukur, berpendidikan, profesional, serta berintegritas. • *Imam Suwandi*

Catatan Pelaksanaan Penyusunan SKKNI:

- Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang pers atau kewartawanan pada Rabu (11/5) di Kota Tangerang Selatan, Banten.
- Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Jurnalistik pada Selasa (17/5) di Kota Tangerang Selatan, Banten.

DUA KASUS MENARIK DI BULAN MEI

Oleh: **REZA ANDREAS**

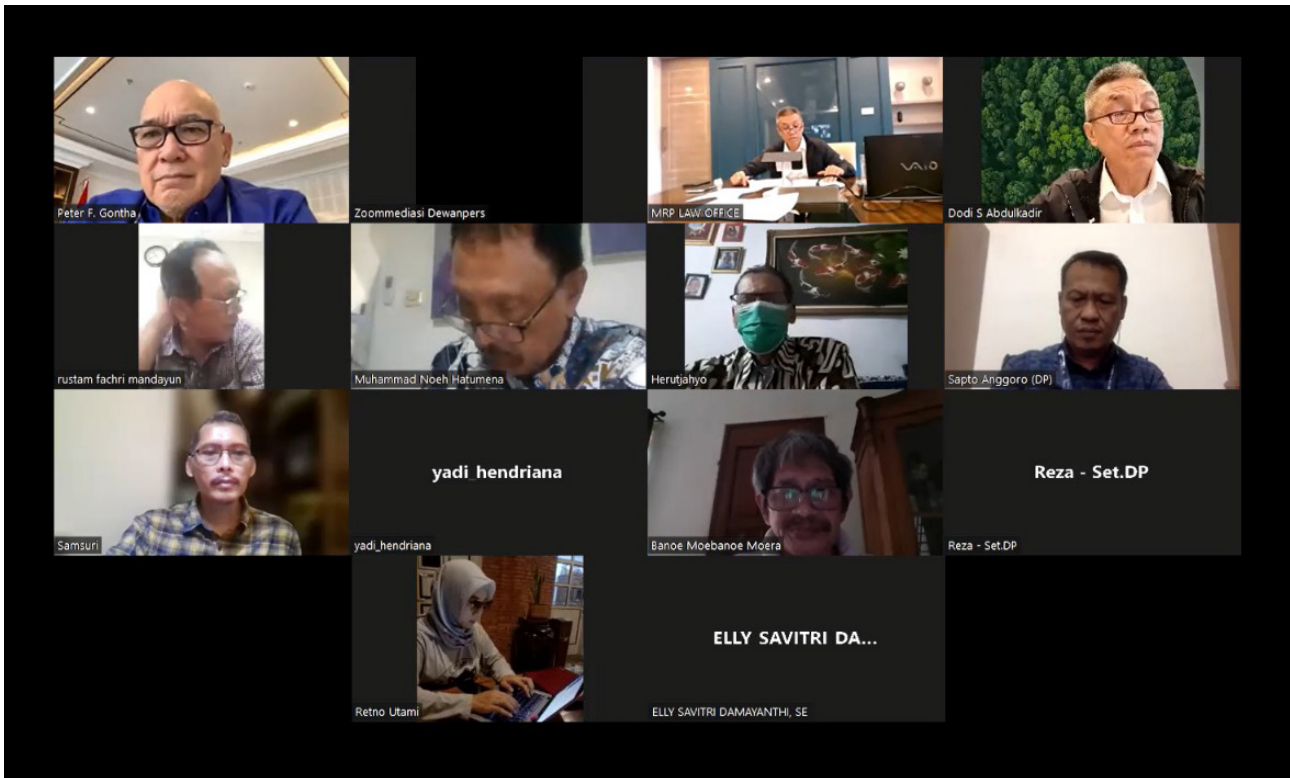
Subkoordinator Pengaduan
Sekretariat Dewan Pers



Pada bulan Mei 2022 Komisi Pengaduan Dewan Pers menerima 45 kasus pengaduan dari berbagai unsur, mulai dari lembaga, pimpinan daerah, masyarakat umum, perusahaan swasta, dan wiraswasta. Dalam proses penyelesaian aduan, Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers telah melaksanakan pertemuan mediasi dan klarifikasi sebanyak empat kali yang menghasilkan dua risalah penyelesaian dan dua pernyataan penilaian dan rekomendasi (PPR). Selain melalui proses mediasi dan klarifikasi, Dewan Pers juga menyelesaikan pengaduan melalui surat penilaian dan rekomendasi. Sebanyak 28 kasus diselesaikan melalui mekanisme ini.

PENYELESAIAN PENGADUAN

Bulan Mei ini merupakan akhir masa bakti anggota Dewan Pers periode 2019-2022 untuk kemudian diteruskan oleh anggota Dewan Pers terpilih periode 2022-2025. Oleh karena itu, karena telah ada proses serah terima jabatan Dewan Pers, Komisi Pengaduan tidak terlalu banyak melaksanakan pertemuan penyelesaian pengaduan, baik melalui pertemuan penyelesaian pengaduan, baik melalui pertemuan mediasi maupun klarifikasi, dan lebih fokus menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat-menyurat.



A PIHAK PENGADU, PETER F. GONTHA DIDAMPINGI KUASA HUKUM DARI MR & PARTNERS LAW OFFICE MENGHADIRI UNDANGAN DEWAN PERS DALAM PENYELESAIAN PENGADUAN DENGAN PIKIRAN-RAKYAT.COM SECARA DARING PADA RABU (25/5/2022). (FOTO: DEWAN PERS)

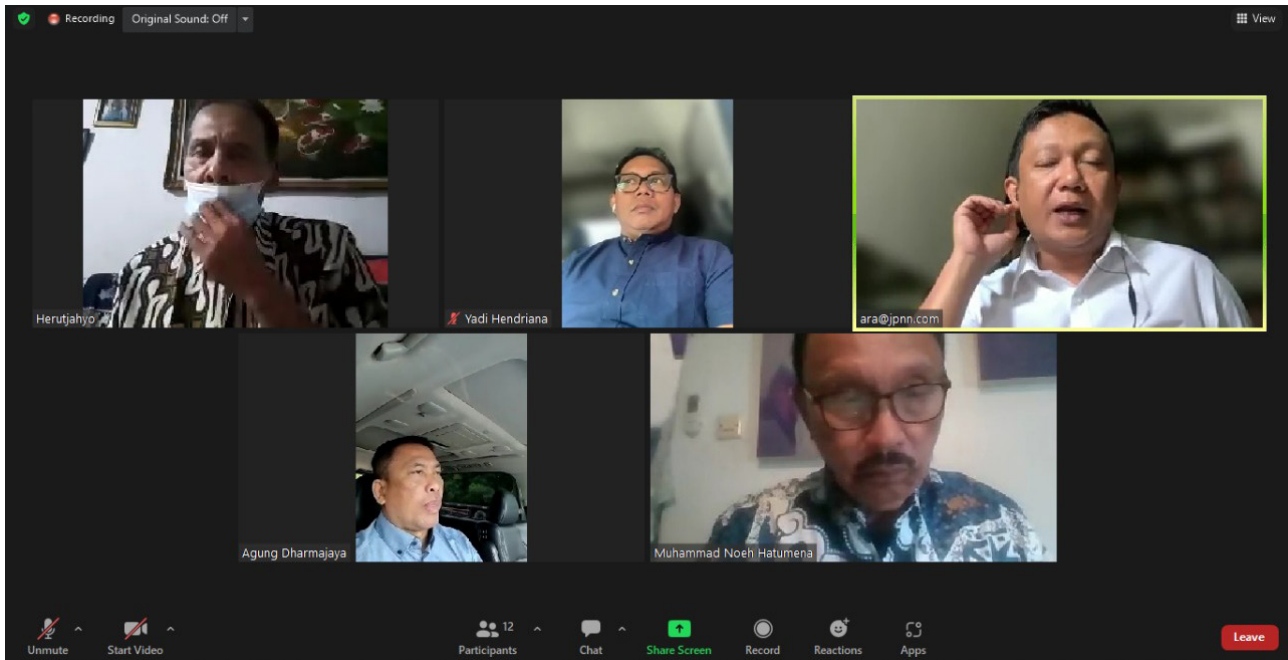
Namun demikian ada beberapa kasus yang menarik. Pertama adalah kasus pengaduan berita yang dilayangkan oleh tokoh politik dari salah satu partai besar di Indonesia. Ia (pengadu) melaporkan sebuah media *online*/daring (teradu) yang menurut pengadu, berita teradu tersebut melukai harkat dan martabat dirinya. Dewan Pers memanggil kedua pihak tersebut dan kemudian mengklarifikasi dalam sebuah forum penyelesaian pengaduan.

Dalam pertemuan tersebut Tim Analis Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers menemukan bahwa berita teradu merupakan hasil dari penyuntingan atas berita yang dikutip dari Kantor Berita Antara. Pengadu keberatan atas hasil penyuntingan tersebut karena tidak sesuai dengan berita awalnya dan merugikan nama baiknya. Selain itu pengadu tidak pernah dikonfirmasi/dihubungi sebelumnya oleh teradu.

Pengadu, sebelum mengirim pengaduannya ke Dewan Pers, telah mengirimkan hak jawab kepada

teradu. Namun, menurut pengadu, hak jawabnya tidak dimuat secara utuh dan permintaan maafnya tidak dimuat secara proporsional, serta judul berita melukai nama dan reputasinya. Oleh karena itu pengadu melaporkan ke Dewan Pers karena berharap mendapatkan pemulihan nama baik secara maksimal. Teradu ketika diklarifikasi oleh Tim Analis Komisi Pengaduan Dewan Pers mengakui, bahwa berita tersebut diambil dari kantor berita Antara yang disunting.

Lantaran ada permintaan dari pengadu, teradu kemudian menghapus berita tersebut. Anggota Dewan Pers yang memimpin pertemuan tersebut mengatakan, bahwa berita yang telah dipublikasi oleh media tidak boleh secara serta-merta dihapus, kecuali terkait masalah SARA (suku, agama, ras, antargolongan), kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban, atau berdasarkan keputusan Dewan Pers. Di samping itu pencabutan berita wajib disertai alasan. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber butir (5).



A KOMISI PENGADUAN DAN PENEGAKAN ETIKA PERS DEWAN PERS MELAKUKAN KLARIFIKASI SECARA DARING TERKAIT SALAH SATU BERITA YANG DIUNGGAH OLEH JPNN.COM (30/5/2022). (FOTO: DEWAN PERS)

Berdasarkan hasil dalam pertemuan klarifikasi tersebut Dewan Pers menilai teradu melanggar pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena tidak akurat, tidak berimbang, dan memuat opini yang menghakimi. Berita teradu juga tidak sesuai dengan butir 2 huruf a dan b Pedoman Pemberitaan Media Siber terkait verifikasi dan keberimbangan berita. Bahwa setiap berita harus melalui verifikasi, serta berita yang merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

Pencabutan berita yang dilakukan teradu juga dinilai tidak sesuai dengan huruf 5 Pedoman Pemberitaan Media Siber. Atas penilaian tersebut Dewan Pers merekomendasikan teradu untuk melayani kembali hak jawab dari pengadu secara proporsional disertai dengan permintaan maaf kepada pengadu dan masyarakat pembaca. Dewan Pers juga mendorong teradu untuk memperbaiki kerja jurnalistiknya dan secara intensif menyelenggarakan pelatihan bagi segenap wartawannya untuk meningkatkan profesionalitas.

Selain kasus itu, Dewan Pers juga menyelesaikan satu kasus yang menarik di bulan Mei ini. Kasus ini merupakan temuan dari Dewan Pers, seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pasal 15 ayat 2c, bahwa Dewan Pers mengawasi pelaksanaan KEJ. Temuan Dewan Pers adalah salah satu berita yang diunggah oleh sebuah media siber dengan judul “Suami Mencari Nafkah, Istri Puas Main Kuda-kudaan Sama Selingkuhan, Digoyang 2 Ronde”.

Dewan Pers memanggil media tersebut dalam pertemuan klarifikasi dan menemukan, bahwa berita tersebut berasal dari media yang lain yang kemudian dikutip dan diunggah tanpa diketahui oleh pimpinan redaksinya. Dewan Pers menilai berita tersebut melanggar Pasal 4 KEJ karena bersifat cabut dan merekomendasikan agar berita tersebut dicabut disertai dengan permintaan maaf kepada public. Dewan Pers dalam pertemuan tersebut juga mengingatkan supaya media tersebut menyempurnakan tata kelola redaksi dan dalam menjalankan tugas jurnalistik wajib berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. ●



DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

SIARAN PERS Imbauan Dewan Pers Terkait Pemberitaan Media Tentang Peristiwa Kemanusiaan

Dewan Pers sebagai lembaga yang bertugas menjalankan pengawasan pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, dan memastikan pers menjalankan tugas, peran dan fungsi dalam membuat berita yang bertanggung jawab serta berintegritas, memandang perlu mengeluarkan imbauan sebagai berikut :

1. Dalam beberapa hari ini, pers di tanah air dihebohkan dengan pemberitaan tentang hanyutnya putra sulung Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat), Emmeril Khan Mumtadz atau Eiril, yang terbawa arus di sungai AaRee, Swiss.
2. Dewan Pers memahami bahwa Pers bertugas mencari informasi, melakukan pemberitaan dengan baik dan benar sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.
3. Namun demikian, Dewan Pers mengimbau kepada seluruh insan pers dan jajaran news room dari berbagai platform media di tanah air untuk bekerja sesuai dengan kode etik dan melakukan pemberitaan dengan penuh tanggung jawab dan berdampak positif bagi publik.
4. Selain itu juga, media dari berbagai platform seyogianya tidak membuat berita yang berkaitan dengan prediksi atau ramalan terkait sebuah peristiwa tragedi kemanusiaan.
5. Dalam hemat Dewan Pers, seyogianya lembaga pers lebih banyak menampilkan karya jurnalistik yang berdampak positif bagi kemanusiaan, sesuai kode etik dan tidak melakukan glorifikasi yang akan membuat setiap keluarga korban tragedi kemanusiaan tertekan dan merasa bersalah.
6. Dewan Pers juga mengajak kepada seluruh jajaran redaksi di seluruh platform media, untuk bersama-sama mengedepankan jurnalisme empati dan tentu, tetap berpegang teguh terhadap Kode Etik Jurnalistik.

Demikian imbauan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Jakarta, 29 Mei 2022.
Dewan Pers,


Azyumardi Azra.
Ketua
DEWANPERS

Narahubung:

1. M. Agung Dharmajaya, Wakil Ketua Dewan Pers: +62 818 912099
2. Yadi Hendriana, Ketua Pengaduan dan Penegakan Etika Pers: +62 817129426

SIARAN PERS

Imbauan Dewan Pers Terkait Pemberitaan Media Tentang Peristiwa Kemanusiaan



DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

Pernyataan Sikap Dewan Pers No 01/P-DP/VI/2022

Tentang

Penembakan yang dilakukan Tentara Israel terhadap Wartawati Al Jazeera

Dewan Pers mengecam keras penembakan yang dilakukan tentara Israel atas wartawati Al Jazeera, Shireen Abul Akleh saat sedang meliput di kota Jenin, Tepi Barat. Dewan Pers Republik Indonesia menyampaikan dukacita mendalam kepada keluarga Shireen dan empati kepada jaringan televisi Al Jazeera. Tindakan barbar tentara Israel atas wartawati yang bertugas meliput dengan memakai rompi Press, jelas melanggar kepatutan, dan menunjukkan sikap tidak terpuji.

Dewan Pers mendesak pemerintah Israel melakukan penyelidikan serius dan menghukum tentaranya yang melakukan kesalahan. Dan mendesak PBB dan lembaga internasional lainnya meminta Israel untuk mematuhi hukum internasional yang selama ini sering dilanggar.

Jakarta, 12 Mei 2022

Dewan Pers,



Mohammad NUH
Ketua

Nara Hubung: Asep Setiawan-062-8567980840

Ketika menyampaikan sambutan, M Nuh menegaskan ada banyak masalah dan tantangan di dunia pers masa kini. Terutama dalam hal migrasi ke dunia digital.

Turut memberikan pandangan dan harapan kepada Anggota Dewan Pers periode 2022 - 2025 adalah Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyahi dan Ketua Dewan Pers periode 2013 - 2016 Prof Bagir Manan. "Kemerdekaan pers yang menjadi landasan kehidupan pers nasional mesti ditegakkan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kami akan selalu mendukung kinerja Dewan Pers agar mampu mengemban amanah UU Pers guna mengembangkan kehidupan pers nasional yang profesional," ujar Abdul Kharis. *



Anggota Dewan Pers terpilih Periode 2022-2025 berfoto bersama dalam acara Serah Terima Jabatan Anggota Dewan Pers di Jakarta (18/5/2022)



DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

RILIS MEDIA

Ketua Dewan Pers Prof Azyumardi Azra: Dewan Pers Solid Hadapi Tantangan.

Jakarta, 19 Mei 2022

Profesor Azyumardi Azra resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Pers periode 2022 - 2025. Demikian hasil sidang pleno pertama Anggota Dewan Pers periode tersebut, yang berlangsung di hotel Aryaduta, Jakarta (18/3/2022), sesaat sebelum pelaksanaan serah terima jabatan dari Anggota Dewan Pers periode 2019 - 2022. Sementara itu Agung Dharmajaya mendapat kepercayaan sebagai Wakil Ketua.



Ketua Dewan Pers terpilih Periode 2022-2025, Azyumardi Azra memberikan sambutan dalam acara Serah Terima Jabatan Anggota Dewan Pers, Jakarta (18/5/2022)

salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14/M Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers, kepada seluruh anggota terpilih oleh Ketua Dewan Pers periode 2019 - 2022 Muhammad Nuh.

Dalam sambutan singkatnya, Azyumardi yang terpilih sebagai Anggota Dewan Pers dari unsur tokoh masyarakat, meminta agar anggota Dewan Pers solid. "Tantangan dalam kehidupan pers nasional membutuhkan perhatian besar kita bersama. Untuk itu kita harus solid," imbau mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah itu.

Acara serah terima jabatan Anggota Dewan Pers pada malam harinya ditandai dengan penandatanganan berita acara, serta penyerahan

RILIS MEDIA

Ketua Dewan Pers Prof Azyumardi Azra: Dewan Pers Solid Hadapi Tantangan.

GRAFIK DEWAN PERS

PELAKSANAAN MEI 2022

DATA REKAPITULASI PRESENTASE UKW 2022

No	Nama Provinsi	Peserta UKW	Tidak Hadir UKW	Kehadiran (%)
9	Aceh	60	2	97%
10	Jawa Barat	64	8	88%
11	Jawa Timur	65	2	97%
12	Jawa Tengah	46	0	100%
13	Kalimantan Selatan	53	1	98%
14	Bali	54	1	98%
15	Sumatera Utara	64	3	95%
16	Sumatera Selatan	54	5	91%

JUMLAH PESERTA JENJANG

Jenjang	Muda	Madya	Utama	Kompeten	Jumlah Kompeten (%)
	36	18	6	56	97%
	41	4	3	48	86%
	52	7	4	62	98%
	30	8	4	42	91%
	36	12	5	46	88%
	25	19	10	53	100%
	32	20	9	58	95%
	36	18	0	44	90%

DATA PROGRAM VERIFIKASI PERUSAHAAN PERS BULAN MEI 2022

JENIS MEDIA	CETAK	RADIO	TELEVISI	SIBER	
					
Terverifikasi Administratif dan Faktual	3	0	0	29	32
Terverifikasi Administratif	0	0	0	3	3
JUMLAH					35

TERVERIFIKASI ADMINISTRATIF

NO	NAMA MEDIA	JENIS MEDIA	PROVINSI
1	Berkatnewstv.com	Siber	Kalimantan Barat
2	jejakkeadilan.com	Siber	Bengkulu
3	tintabangsa.com	Siber	Bengkulu



TERVERIFIKASI ADMINISTRATIF & FAKTUAL

NO	NAMA MEDIA	JENIS MEDIA	PROVINSI
4	Radar Riau	Cetak	Riau
5	Headline Lampung	Cetak	Lampung
6	Fajar Pendidikan	Cetak	Sulawesi Selatan

TERVERIFIKASI ADMINISTRATIF & FAKTUAL

NO	NAMA MEDIA	JENIS MEDIA	PROVINSI
7	indonesiainteraktif.com	Siber	Bengkulu
8	halosumsel.co.id	Siber	Sumatera Selatan
9	Beritatotabuan.com	Siber	Sulawesi Utara
10	Fixsnews.co.id	Siber	Banten
11	Viral24.co.id	Siber	Sumatera Utara
12	sakanews.com	Siber	Lampung
13	kroniktotabuan.com	Siber	Sulawesi Utara
14	kaltengonline.com	Siber	Kalimantan Tengah
15	Beritabatam.com	Siber	Kepulauan Riau
16	Bintangpost.com	Siber	Lampung
17	eranasional.com	Siber	Jawa Barat
18	akselnews.com	Siber	Sumatera Selatan
19	sulseleksespres.com	Siber	Sulawesi Selatan
20	bacapesan.com	Siber	Sulawesi Selatan
21	ujungjari.com	Siber	Sulawesi Selatan
22	abatanews.com	Siber	Sulawesi Selatan
23	bogor-kita.com	Siber	Jawa Barat
24	suaradewata.com	Siber	Bali
25	kilasbali.com	Siber	Bali
26	beritabuana.co	Siber	DKI Jakarta
27	pikiran-rakyat.com	Siber	Jawa Barat
28	rmolsumut.id	Siber	Sumatera Utara
29	inilahmedan.com	Siber	Sumatera Utara
30	fajarsumatera.co.id	Siber	Lampung
31	PancarPOS.com	Siber	Bali
32	radar-palembang.com	Siber	Sumatera Selatan
33	narasinews.id	Siber	Jawa Timur
34	balitopnews.com	Siber	Bali
35	Updatebali.com	Siber	Bali



DEWANPERS

LAPORAN PERBULAN KASUS PENGADUAN TAHUN 2022



SURAT



3 Surat

Surat penilaian dan rekomendasi sementara/klarifikasi.

0 Surat

Surat Undangan Mediasi.

23 Surat

Surat Keputusan/penilaian akhir/tanggapan.

28 Surat

Penyelesaian kasus melalui surat-menyurat.

LAPORAN PENGADUAN SELAMA BULAN MEI 2022

Risalah No 25

jpnn.com

Risalah No 26

Peter F. Gontha dengan
pikiran-rakyat.com

PPR: 16 PPR

terhadap
sinarkeadilan.com
atas pengaduan
Tornado Varancis
Togatorop

PPR: 17 PPR

terhadap
indigonews.id
atas pengaduan
Nikson Nababan



ANGGOTA DEWAN PERS, NINIK RAHAYU (KELIMA DARI KIRI) DIDAMPINGI OLEH SEKRETARIS DEWAN PERS, SYAEFUDIN (KEEMPAT DARI KIRI) DAN SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN PERS, SRI LESTARI (KETIGA DARI KIRI) MENERIMA KUNJUNGAN AUDIENSI DARI ROMBONGAN SEKRETARIAT DPRD JAWA BARAT PADA RABU (25/5/2022) DI GEDUNG DEWAN PERS, JAKARTA. (FOTO: DEWAN PERS)





HALAL BIHALAL DEWAN PERS YANG TURUT DI HADIRI OLEH SELURUH ANGGOTA DEWAN PERS BESERTA JAJARANNYA PADA RABU (18/5/2022) DI GEDUNG DEWAN PERS, JAKARTA. (FOTO: DEWAN PERS)



RAPAT BERSAMA ANTARA DEWAN PERS DENGAN MITRA PELAKSANA SURVEI PT SUCOFINDO (PERSERO) DENGAN AGENDA PERSIAPAN ACARA FOCUS GROUP DISCUSSION NATIONAL ASSESSMENT COUNCIL (NAC) INDEKS KEMERDEKAAN PERS, PADA SELASA (31/5/2022). (FOTO: DEWAN PERS)

